

REVIUW RENSTRA 2024-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan ini akan menjadi tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan berdasarkan Hukum sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Tentang Renstra K/L (Sesuai Kementrian masing-masing Perangkat Daerah);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten

Bangkalan Tahun 2023 Nomor .../....)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 adalah:

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja selama 3 (tiga) tahun.

b. Tujuan

- 1) Sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
- 2) Sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan No. 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

- **Tugas**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

- **Fungsi**

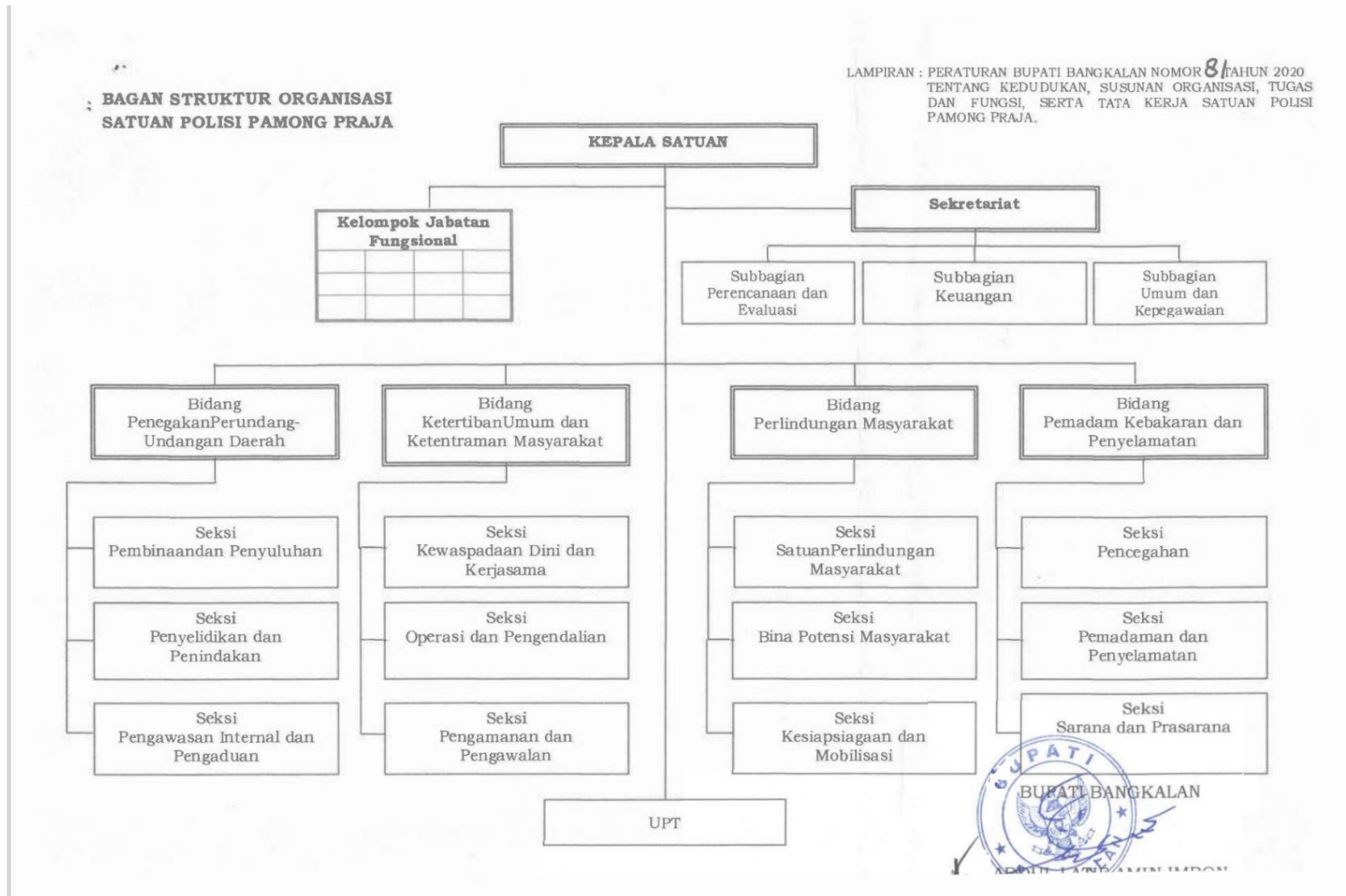
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan ocal atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan No. 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Satuan;
- b) Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penindakan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan internal dan Pengaduan.
- d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama;
 - 2. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - 3. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.
- e) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensial Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesiapsiagaan dan Mobilisasi.
- f) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- g) UPT.
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN



Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangkalan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S-2)	4
2.	Strata 1 (S-1)	78
3.	Sarjana Muda / D3	-
4.	SLTA / SMK / KPAA	230
5.	SLTP	9
6.	SD	1
Jumlah		322

B. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Perjenjangan	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	4
2.	SPAMA/ DIKLATPIM III	3
3.	SPAMEN	1
Jumlah		8

C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	1
2.	II	20
3.	III	51
4.	IV	4
Jumlah		76

D. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	2
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	11
4.	Fungsional	2
5.	Staf	56
Jumlah		76

E. Dukungan Personil (PNS) Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2022

JUMLAH PERSONIL (PNS/CPNS/THL)						
Jabatan Struktural yang Harus Ada	Jabatan Struktural yang Ada	Non Struktural	Jabatan Fungsional	PNS	THL	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7= (1+2+3+4+5+6)
	17		2	57	246	322

F. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perlengkapan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 6 (TRUCK)	3	Truk Patroli, Truk Damkar (2)
2	Kendaraan Roda 4	6	EX Patroli, EX Patwal, Patroli, Patwal, Ertiga, Avanza
3	Kendaraan Roda 3	2	Viar Pemadam Kebakaran

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
4	Kendaraan Roda 2	13	Benelli (4), Lexi (4), Kirana 2 (Rusak), TRS 1 (Rusak Berat), TS 2 (Rusak Berat)
5	Handy Talky	21	6 (Baik) 15 (Rusak Berat)
6	Komputer	13	8 (Baik) 5 (Rusak Ringan)
7	Laptop	13	6(Baik) 4(Rusak Ringan) 3(Rusak Berat)
8	AC	15	4(Baik) 11(Rusak Ringan)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran diperoleh data capaian sebagai berikut :

1. Sasaran terselenggaranya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan indicator:
 - a) persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menunjukkan capaian kinerja 99% yaitu sebanyak 114 kegiatan penanganan gangguan ketentramanan yang ditangani.
 - b) persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah menunjukkan capaian kinerja 100% yaitu sebanyak 101 kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - c) persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat menunjukkan capaian kinerja 100% yaitu sebanyak 20 orang Satlinmas di desa Sepulu yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM.
2. Sasaran terselenggaranya penanggulangan kebencanaan, dengan indicator:

- a) persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana menunjukkan capaian kinerja 100% yaitu sebanyak 30 aparatur linmas melaksanakan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota dan melaksanakan 101 kali Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas.
3. persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran menunjukkan capaian kinerja 107% yaitu sebanyak 82 kali Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota namun pada kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran belum maksimal karena tidak ada penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan baru.
4. Sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan, dengan indicator Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan kesekretariat menunjukkan capaian indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan sebesar 100%.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, maka telah ditetapkan standar pencapaian dengan skala sebagaimana tabel berikut :

Standar Pencapaian Kinerja

NO.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN
1.	Sangat Baik	>90
2.	Baik	75,00 – 89,99
3.	Cukup	65,00 – 74,99
4.	Kurang	50,00 – 64,99
5.	Sangat Kurang	0 – 49,99

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dari sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sesuai dengan rencana strategis 2018- 2023 dapat dirinci lebih lanjut pada tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	99%	99%
	persentase penyelenggaraan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah	100%	100%	100%
	persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	100%	100%	100%
Terselenggaranya penanggulangan kebencanaan	persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100%	100%	100%
	persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	107%	107%
Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	100%

Sebagaimana Tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada sasaran terselenggaranya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada tahun 2021 menunjukkan pencapaian:
 - a) 99% pengaduan yang ditangani **(sangat baik)**
 - b) 100% Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan **(sangat baik)**
 - c) 100% aparatur linmas yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM **(sangat baik)**
2. Pada sasaran terselenggaranya penanggulangan kebencanaan pada tahun 2021 menunjukkan pencapaian:
 - a) 100% aparatur linmas melaksanakan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota **(sangat baik)**
 - b) 107% layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dalam respon time **(sangat baik)**
3. Pada sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan menunjukkan pencapaian:
 - a) Indeks kepuasan layannan internal kesekretariatan yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 100% **(sangat baik)**

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 x patroli dalam sehari			1 kali	1 kali	2 kali	1 kali	1 kali	0,5	1 kali	1 kali	1 kali		50%	100%	50%	100%	
3	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota	1 org setiap Rw/Dusun			1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	100%	100%	
4	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran	100%			85%	85%	90%	95%	95%	100%	85%	90%	95%		118%	100%	100%	100%	
5	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		(Jml Satpol PP/Jml Penduduk) x 10.000		3,31	3,21	3,17	2,96	2,96	3,31	3,21	3,17	2,96		100%	100%	100%	100%	
6	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		Jml Limas/ RW (Dusun)		1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	100%	100%	
7	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		Jml Pos Kamling / Jml Desa/Kelurahan		3,34	4,88	4,88	4,88	4,89	3,34	4,88	4,88	4,88		100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023**	2019	2020	2021	2022	2023**	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	110.719.400	113.071.600				109.928.600	112.371.600				99%	99%				2%	2%
1 Pengadaan Mebeleur	-	-				-	-				-	-					
2 Pengadaan Alat - Alat Studio dan Komunikasi	-	-				-	-				-	-					
3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.719.400	-				109.928.600	-				0,99	-				-100%	-100%
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	113.071.600				0	112.371.600				-	0,99					
5 Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor	-	-				-	-				-	-					

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		314.406.900	345.209.600				313.715.900	341.389.050				100%	99%			10%	9%
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	314.406.900	345.209.600				313.715.900	341.389.050				1,00	0,99			10%	9%
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-				-	-				-	-				
3	Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	-	-				-	-				-	-				
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		15.000.000	5.000.000				14.737.175	4.430.750				98%	89%			-67%	-70%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	2.500.000				9.952.575	2.484.400				1,00	0,99			-75%	-75%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	2.500.000				4.784.600	1.946.350				0,96	0,78			-50%	-59%
PROGRAM PENINGKATAN DAN OPTIMALISASI KINERJA SATUAN UNIT KERJA		3.688.855.650	4.095.731.750				3.533.386.454	3.936.103.755				96%	0,96			11%	11%
1	Penunjang Operasional SKPD	3.688.855.650	4.095.731.750				3.533.386.454	3.936.103.755				0,96	0,96			11%	11%

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		463.290.600	270.849.650			454.112.150	263.899.150			98%	97%			-42%	-42%
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	149.712.000	91.846.550			147.627.000	87.660.550			0,99	0,95			-39%	-41%
2	Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan	313.578.600	179.003.100			306.485.150	176.238.600			0,98	0,98			-43%	-42%
3	PAM PEMILU	-	-			-	-			-	-				
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL		947.888.400	280.247.825			929.913.500	274.113.000			98%	95%			-70%	-71%
1	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	177.008.400	37.211.900			167.678.800	34.149.400			0,95	0,92			-79%	-80%
2	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	71.795.000	34.993.550			71.111.200	32.518.550			0,99	0,93			-51%	-54%
3	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	699.085.000	208.042.375			691.123.500	207.445.050			0,99	1,00			-70%	-70%

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

	5.540.160.950	5.110.110.425				5.355.793.779	4.932.307.305				10	9				-0	-0
Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023**	2019	2020	2021	2022	2023**	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020

5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.591.779.627	12.780.742.502			12.283.832.072	12.673.399.868				89%	97%		-31%	-16%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39.051.600	30.807.100			39.051.450	30.686.000				100%	100%		-45%	-45%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			26.503.400	5.924.500			26.503.400	5.903.000				100%	100%		-78%	-78%
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-	14.748.100			-	14.660.000						-		
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.755.000	1.599.100			4.754.950	1.593.000				100%	100%		-66%	-66%
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.793.200	8.535.400			7.793.100	8.530.000				100%	100%		10%	9%

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

5.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
5.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.803.206. 982	6.372.122.9 84			5.735.279.1 93	6.308.337 .571			94 %	98 %		1%	10%	
5.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.768.933. 982	6.358.881.1 84			5.701.955.0 93	6.295.371 .571			99 %	99 %		10%	10%	
5.01.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.830.000	6.492.000			3.264.200	6.472.150			85 %	10 0%		70%	98%	
5.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			30.443.00 0	6.749.800			30.059.900	6.493.850			99 %	96 %		-78%	-78%	
5.01.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.735.200				5.491.000				96 %		0%	0%	
5.01.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
5.01.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.735.200				5.491.000				96 %				
5.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			176.650.00 0	-			150.639.00 0	-			99 %			-100%	-100%	
5.01.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			151.650.0 00				150.639.00 0				99 %			-100%	-100%	
5.01.01. 2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			25.000.00 0	-			0							-100%		
5.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			223.393.30 0	174.337.73 5			121.855.90 3	166.491.4 30			69 %	97 %		-30%	38%	
5.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.106.500	2.769.650			8.250.000	2.705.500			91 %	98 %		-70%	-67%	

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

1.05.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

5.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			54.695.40 0	54.695.400			46.101.128	51.027.19 5			84 %	93 %		0%	11%
5.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.969.549. 345	5.557.067.0 00			5.938.256.4 00	5.540.797 .930			99 %	10 0%		-7%	-7%
5.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			320.288.00 0	449.512.13 3			247.742.99 8	434.103.7 92			77 %	94 %		26%	29%
5.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			320.288.0 00	402.542.13 3			247.742.99 8	391.878.7 92			77 %	97 %		26%	58%
5.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
5.01.01. 2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				46.970.000				42.225.00 0				90 %			
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			320.942.60 0	978.207.77 9			314.686.80 0	922.341.8 29			98 %	94 %		-17%	-23%
5.01.02. 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			246.513.70 0	370.854.50 0			241.257.90 0	351.075.3 00			94 %	90 %		67%	83%
1.05.02. 2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,			108.785.50 0	245.524.75 0			107.737.60 0	235.610.8 00			77 %	77 %		126%	119%

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

	Pengamanan, dan Pengawalan																			
1.05.02. 2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			6.640.000	5.400.000			6.577.600	5.220.000				99 %	97 %			-19%	-21%		
1.05.02. 2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			21.000.500	3.732.000			20.429.500	3.732.000				97 %	100 %			-82%	-82%		
1.05.02. 2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			45.273.000	25.565.000			44.735.500	18.156.000				99 %	71 %			-44%	-59%		
1.05.02. 2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			36.660.000				35.430.000					97 %				-100%	-100%		
1.05.02. 2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																			
1.05.02. 2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada																			
1.05.02. 2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			11.344.900	86.420.250			10.337.900	84.175.000				91 %	97 %			662%	714%		

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

1.05.02. 2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia			16.809.800	4.212.500			16.009.800	4.181.500			95 %	99 %	-75%	-74%
1.05.02. 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			58.865.400	607.353.279			57.865.400	571.266.529			100 %	98 %	-16%	-30%
1.05.02. 2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				556.623.779				538.803.179				97 %		
1.05.02. 2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			27.496.000	11.899.250			27.496.000	11.667.100			100 %	98 %	-57%	-58%
1.05.02. 2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			31.369.400	38.830.250			30.369.400	20.796.250			100 %	100 %	24%	-32%
1.05.02. 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			15.563.500	-			15.563.500	-			100 %		-100%	-100%
1.05.02. 2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			15.563.500	-			15.563.500				100 %		-100%	-100%
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			10.167.700	13.649.000			9.367.700	13.649.000			92 %	100 %	-44%	-20%
1.05.03. 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			10.167.700	5.710.500			9.367.700	5.710.500			92 %	100 %	-44%	-39%
1.05.03. 2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

1.05.03. 2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																
1.05.03. 2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																
1.05.03. 2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		10.167.700	5.710.500			9.367.700	5.710.500			92 %	10 0%		-44%		-39%	
1.05.03. 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		-	7.938.500				7.938.500				10 0%		0%		0%	
1.05.03. 2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit wabah zoonosis			7.938.500				7.938.500				10 0%					
1.05.03. 2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																
1.05.03. 2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
1:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		2.096.314.300	100.000.000			2.081.784.300	92.729.000			82 %	72 %		30%		27%	
1.05.04. 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.096.314.300	93.100.000			2.081.784.300	88.129.000			82 %	94 %		30%		55%	

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

1.05.04. 2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.740.000	24.660.000			10.590.000	23.875.000			99 %	97 %		130%	125%
1.05.04. 2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			23.600.000	21.000.000			13.800.000	20.055.000			58 %	96 %		-11%	45%
1.05.04. 2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			7.500.000	21.000.000			5.460.000	18.795.000			73 %	90 %		180%	244%
1.05.04. 2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			2.040.674.000	19.190.000			2.040.674.000	18.974.000			10 0%	99 %		-99%	-99%
1.05.04. 2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			13.800.300	7.250.000			11.260.300	6.430.000			82 %	89 %		-47%	-43%
1.05.04. 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				6.900.000				4.600.000				50 %		0%	0%
1.05.04. 2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				4.600.000				4.600.000				10 0%			
1.05.04. 2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				2.300.000				-				0%			
1.05.04. 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran															
1.05.04. 2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat															
1.05.04. 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia															

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2024 - 2026

1.05.04. 2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi																
				15.019.204 .227	13.872.599. 281			14.689.670. 872	13.702.11 9.697				90 %	91 %		-15%	-8%

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Masyarakat Kabupaten Bangkalan. Adapun mitra Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kegiatan :

- a. Jajaran TNI/Polri dalam hal koordinasi dan kerja sama yang baik dengan organisasi perangkat daerah;
- b. Sekertariat Daerah Bagian Perekonomian sebagai Sekretariat DBHCHT Kabupaten Bangkalan;
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura sebagai mitra di dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal;
- d. Aparat kewilayahan dan masyarakat dalam hal pemberian dukungan informasi;
- e. Peraturan/perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan PD

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan telah berupaya menyelaraskan program dan kegiatannya. Namun masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan pelayanannya. Beberapa permasalahan pelayanan yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Masih banyak pelanggaran Perda/Perkada yang mengandung sanksi. Pelanggaran Perda/Perkada yang paling banyak ditangani oleh Satpol PP adalah pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Respon atas pengaduan masyarakat. Dimana komunikasi dilakukan lebih banyak melalui media sosial, masyarakat lebih mudah melaporkan pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum kemudian juga memantau respon dari Satpol PP Kab. Bangkalan. Perubahan komunikasi ini menjadi tantangan bagi Satpol PP Kab. Bangkalan untuk siap sedia dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
3. Belum adanya bantuan hukum bagi Anggota Satpol PP jika terjadi bentrokan. Aturan yang ada di Kabupaten Bangkalan hanya pendampingan kelembagaan dan bukan perkara pidana sehingga timbul keraguan bagi Anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena ada risiko perkara hukum pidana tersebut;
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya kendaraan patroli. Kendaraan patroli ini, baik mobil maupun motor, dibutuhkan untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan dalam penegakkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Motor patroli dibutuhkan dalam pembentukan Patroli Reaksi Cepat sebagai tim khusus dalam merespon cepat pengaduan masyarakat

tentang adanya gangguan trantibum linmas.

3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu perangkat kerja di lingkup Pemerintah Kab. Bangkalan. Mempunyai Tujuan Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat, serta Sasaran Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Jawa Timur dan secara nasional dibawah Kementerian Dalam Negeri, dimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur pada Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Rancanagn Renstra Satpol PP ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dalam bentuk kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Dari isu-isu strategis di atas ada tiga isu utama yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yaitu:

1. Penegakan Perda dan Perkada. Masih banyaknya pelanggaran perda/perkada yang terjadi di Kabupaten Bangkalan serta berulangnya pelanggaran membutuhkan strategi dari Satpol PP Kabupaten Bangkalan terutama yang mampu memberi efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pencegahan atau tindakan preventif juga harus dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan rutin dan intensif kepada masyarakat dan badan hukum tentang Perda/Perkada yang mengandung sanksi.
2. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kabupaten Bangkalan memiliki potensi gangguan atau konflik sosial, ekonomi, dan budaya, dari permasalahan tingkat kota sampai ke lingkup terkecil di dalam masyarakat, yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kabupaten Bangkalan sebagai OPD yang mengemban amanat urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dari negara serta meningkatkan Siskamling di tingkat RW.
3. Pelayanan cepat atas pengaduan masyarakat. Urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh seluruh warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Respon cepat atas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi salah satu isu utama Satpol PP Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah						Sasaran Perangkat Daerah					
Uraian	Indikator	Target				Uraian	Indikator	Target			
		2024	2025	2026	Transisi 2027			2024	2025	2026	Transisi 2027
1	2	3	4	5	6	9	10	13	14	15	16
Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	2,22 %	2,27 %	2,32 %	2,38%	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%
						Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	75%	80%	85%	90%
						Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,85	61,25	61,85	61,85
							Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	85,30	85,50	85,50

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun											
						2023		2024		2025		2026					
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		Rp 8	9		10	11		12	13		14
	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada					2,17	%	Rp 14.816.425.725	2,22	%	Rp 15.293.993.416	2,27	%	Rp 14.846.493.417	2,32	%	Rp 14.856.493.417
		Persentase gangguan ketertiban, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan				100	%	Rp 2.403.670.850	100	%	Rp 2.555.060.250	100	%	Rp 2.055.060.250	100	%	Rp 2.009.060.250

			Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum		100	%	Rp 2.398.670.850	100	%	Rp 2.525.060.250	100	%	Rp 2.025.060.250	100	%	Rp 1.979.060.250
			Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)		100	%	Rp 81.390.000	100	%	Rp 644.270.000	100	%	Rp 144.270.000	100	%	Rp 98.270.000
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	48	Kasus	Rp 7.250.000	48	Kasus	Rp 7.250.000	48	Kasus	Rp 7.250.000	48	Kasus	Rp 7.250.000

					Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3	Kasus	Rp 2.500.000	3	Kasus	Rp 2.500.000	3	Kasus	Rp 2.500.000	3	Kasus	Rp 2.500.000
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 27.520.000	3	Dokumen	Rp 60.000.000	3	Dokumen	Rp 60.000.000	3	Dokumen	Rp 60.000.000
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen	Rp 25.000.000	1	Dokumen	Rp 550.000.000	2	Dokumen	Rp 50.000.000	1	Dokumen	Rp 4.000.000

				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Orang	Rp 4.000.000	20	Orang	Rp 4.000.000	20	Orang	Rp 4.000.000	20	Orang	Rp 4.000.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	Dokumen	Rp 8.020.000	1	Dokumen	Rp 8.020.000	1	Dokumen	Rp 8.020.000	1	Dokumen	Rp 8.020.000
				Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dokumen	Rp 2.500.000	1	Dokumen	Rp 2.500.000	1	Dokumen	Rp 2.500.000	1	Dokumen	Rp 2.500.000
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Laporan	Rp 4.600.000	1	Laporan	Rp 10.000.000	1	Laporan	Rp 10.000.000	1	Laporan	Rp 10.000.000
				Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup	100	%	Rp 2.313.280.850	100	%	Rp 1.876.790.250	100	%	Rp 1.876.790.250	100	%	Rp 1.876.790.250

				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	30	Laporan	Rp 1.813.987.200	30	Laporan	Rp 1.621.985.400	30	Laporan	Rp 1.621.985.400	30	Laporan	Rp 1.621.985.400
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6	Laporan	Rp 4.804.850	6	Laporan	Rp 4.804.850	6	Laporan	Rp 4.804.850	6	Laporan	Rp 4.804.850
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	59	Laporan	Rp 494.488.800	59	Laporan	Rp 250.000.000	59	Laporan	Rp 250.000.000	59	Laporan	Rp 250.000.000
				Persentase aparatur yang ikut pelatihan	100	%	Rp 4.000.000	100	%	Rp 4.000.000	100	%	Rp 4.000.000	100	%	Rp 4.000.000

				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	Rp 4.000.000	1	Laporan	Rp 4.000.000	1	Laporan	Rp 4.000.000	1	Laporan	Rp 4.000.000
			Persentase pelayanan penanggulangan bencana		100	%	Rp 5.000.000	100	%	Rp 30.000.000	100	%	Rp 30.000.000	100	%	Rp 30.000.000
			Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		100	%	Rp 5.000.000	100	%	Rp 20.000.000	100	%	Rp 20.000.000	100	%	Rp 20.000.000
				Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30	Orang	Rp 5.000.000	30	Orang	Rp 20.000.000	30	Orang	Rp 20.000.000	30	Orang	Rp 20.000.000
			Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi		0	%	Rp -	100	%	Rp 10.000.000	100	%	Rp 10.000.000	100	%	Rp 10.000.000

				korban bencana													
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0	Orang		10	Orang	Rp 10.000.000	10	Orang	Rp 10.000.000	10	Orang	Rp 10.000.000
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time				70	%	Rp 197.810.000	75	%	Rp 175.000.000	80	%	Rp 175.000.000	85	%	Rp 175.000.000
			Persentase kejadian kebakaran yang ditangani			100	%	Rp 197.810.000	100	%	Rp 175.000.000	100	%	Rp 175.000.000	100	%	Rp 175.000.000
				Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran		91,67	%	Rp 90.846.200	90	%	Rp 104.835.200	88,3	%	Rp 104.835.200	86,67	%	Rp 104.835.200

				Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10	Dokumen	Rp 48.483.800	10	Dokumen	Rp 24.435.000	10	Dokumen	Rp 24.435.000	10	Dokumen	Rp 24.435.000
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	Laporan	Rp 21.000.000	20	Laporan	Rp 25.200.000	20	Laporan	Rp 25.200.000	20	Laporan	Rp 25.200.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20	Dokumen	Rp 10.500.000	20	Dokumen	Rp 46.000.000	20	Dokumen	Rp 46.000.000	20	Dokumen	Rp 46.000.000
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	13	Unit	Rp 7.482.400	8	Unit	Rp 5.820.200	8	Unit	Rp 5.820.200	8	Unit	Rp 5.820.200

					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	18	Orang	Rp 3.380.000	18	Orang	Rp 3.380.000	18	Orang	Rp 3.380.000	18	Orang	Rp 3.380.000
				Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		100	%	Rp 1.200.000	100	%	Rp 2.400.000	100	%	Rp 2.400.000	100	%	Rp 2.400.000
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	Dokumen	Rp 1.200.000	2	Dokumen	Rp 1.200.000	2	Dokumen	Rp 1.200.000	2	Dokumen	Rp 1.200.000

				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Dokumen	Rp -	2	Dokumen	Rp 1.200.000	2	Dokumen	Rp 1.200.000	2	Dokumen	Rp 1.200.000
				Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100	%	Rp 100.000.000	100	%	Rp 5.220.000	100	%	Rp 5.220.000	100	%	Rp 5.220.000
				Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	15	Orang	Rp 100.000.000	15	Orang	Rp 5.220.000	15	Orang	Rp 5.220.000	15	Orang	Rp 5.220.000
				Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan	100	%	Rp 5.763.800	100	%	Rp 62.544.800	100	%	Rp 62.544.800	100	%	Rp 62.544.800

				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	2	Unit	Rp 5.763.800	15	Unit	Rp 62.544.800	15	Unit	Rp 62.544.800	15	Unit	Rp 62.544.800
		Nilai SAKIP PD			60,39	indeks	12214944875	60,85	indeks	Rp 12.563.933.166	61,25	indeks	Rp 12.616.433.167	61,85	indeks	Rp 12.672.433.167
		Indeks Kepuasan Masyarakat			85,14	nilai		85,25	nilai		85,30	nilai		85,50	nilai	
			Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100	Indeks	Rp 12.214.944.875	100	Indeks	Rp 12.563.933.166	100	Indeks	Rp 12.616.433.167	100	Indeks	Rp 12.672.433.167
			Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan		100	%	Rp 29.957.800	100	%	Rp 31.657.800	100	%	Rp 31.657.800	100	%	Rp 31.657.800

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokum en	Rp 6.164.500	3	Dokum en	Rp 6.164.500	3	Dokum en	Rp 6.164.500	3	Dokum en	Rp 6.164.500
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Dokum en	Rp 8.868.150	1	Dokum en	Rp 8.868.150	1	Dokum en	Rp 8.868.150	1	Dokum en	Rp 8.868.150
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokum en	Rp 1.791.750	1	Dokum en	Rp 1.791.750	1	Dokum en	Rp 1.791.750	1	Dokum en	Rp 1.791.750
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	0	Dokum en	Rp -	1	Dokum en	Rp 850.000	1	Dokum en	Rp 850.000	1	Dokum en	Rp 850.000
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokum en	Rp -	1	Dokum en	Rp 850.000	1	Dokum en	Rp 850.000	1	Dokum en	Rp 850.000

				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 7.012.650	1	Laporan	Rp 7.012.650	1	Laporan	Rp 7.012.650	1	Laporan	Rp 7.012.650
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	Rp 6.120.750	6	Laporan	Rp 6.120.750	6	Laporan	Rp 6.120.750	6	Laporan	Rp 6.120.750
			Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu		100 %		Rp 6.467.354.375	100 %		Rp 6.490.252.666	100 %		Rp 6.577.752.667	100 %		Rp 6.612.752.667
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Orang/bulan	Rp 6.454.377.875	80	Orang/bulan	Rp 6.477.276.166	80	Orang/bulan	Rp 6.564.776.167	80	Orang/bulan	Rp 6.599.776.167

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Rp 7.141.850	1	Laporan	Rp 7.141.850	1	Laporan	Rp 7.141.850	1	Laporan	Rp 7.141.850
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	Rp 5.834.650	18	Laporan	Rp 5.834.650	18	Laporan	Rp 5.834.650	18	Laporan	Rp 5.834.650
				Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir		100	%	Rp 1.611.350	100	%	Rp 3.222.700	100	%	Rp 3.222.700	100	%	Rp 3.222.700
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 1.611.350	1	Dokumen	Rp 1.611.350	1	Dokumen	Rp 1.611.350

					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	Rp 1.611.350	7	Laporan	Rp 1.611.350	7	Laporan	Rp 1.611.350	7	Laporan	Rp 1.611.350
				Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian		100	%	Rp -	100	%	Rp 20.000.000	100	%	Rp -	100	%	Rp 25.000.000
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				322	Paket	Rp 20.000.000	0	Paket	Rp -	0	Paket	Rp -
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	orang	Rp -	0	Orang	Rp -	0	Orang	Rp -	1	Orang	Rp 25.000.000
				Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi		100	%	Rp 85.732.950	100	%	Rp 105.072.600	100	%	Rp 88.535.550	100	%	Rp 84.535.550
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Rp 1.791.800	4	Paket	Rp 5.000.000	4	Paket	Rp 2.500.000	4	Paket	Rp 2.500.000

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	Rp 18.240.650	12	Paket	Rp 18.240.650	12	Paket	Rp 21.981.150	12	Paket	Rp 18.240.650
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	Rp -	4	Paket	Rp 1.586.500	4	Paket	Rp 1.586.500	4	Paket	Rp 1.586.500
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	Rp 9.000.000	8	Paket	Rp 10.000.000	8	Paket	Rp 12.000.000	8	Paket	Rp 11.750.400
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	Rp 1.586.500	12	Paket	Rp 1.787.450	12	Paket	Rp 2.009.900	12	Paket	Rp 2.000.000
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	Rp 1.620.000	4	Dokumen	Rp 3.500.000	4	Dokumen	Rp 3.500.000	4	Dokumen	Rp 3.500.000
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Rp 4.958.000	12	Laporan	Rp 4.958.000	12	Laporan	Rp 4.958.000	12	Laporan	Rp 4.958.000

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59	Laporan	Rp 48.536.000	59	Laporan	Rp 60.000.000	40	Laporan	Rp 40.000.000	40	Laporan	Rp 40.000.000
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD		100	%	Rp 13.489.500	100	%	Rp -	100	%	Rp -	100	%	Rp -
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit		0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp 13.489.500	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	Rp 5.422.633.350	100	%	Rp 5.649.144.800	100	%	Rp 5.650.681.850	100	%	Rp 5.650.681.850
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	Rp 1.462.950	4	Laporan	Rp 1.462.950	4	Laporan	Rp 3.000.000	4	Laporan	Rp 3.000.000

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp 54.695.400	12	Laporan	Rp 201.281.850	12	Laporan	Rp 201.281.850	12	Laporan	Rp 201.281.850
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Rp 5.366.475.000	12	Laporan	Rp 5.446.400.000	12	Laporan	Rp 5.446.400.000	12	Laporan	Rp 5.446.400.000
			Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100	%	Rp 194.165.550	100	%	Rp 264.582.600	100	%	Rp 264.582.600	100	%	Rp 264.582.600
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Unit		1	Unit	Rp 30.240.000	1	Unit	Rp 30.240.000	1	Unit	Rp 30.240.000
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	Rp 182.365.550	19	Unit	Rp 222.542.600	19	Unit	Rp 222.542.600	19	Unit	Rp 222.542.600

				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	Rp 4.470.000	15	Unit	Rp 4.470.000	15	Unit	Rp 4.470.000	15	Unit	Rp 4.470.000
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6	Unit	Rp 1.450.000	6	Unit	Rp 1.450.000	6	Unit	Rp 1.450.000	6	Unit	Rp 1.450.000
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	Rp 5.880.000	1	Unit	Rp 5.880.000	1	Unit	Rp 5.880.000	1	Unit	Rp 5.880.000

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan dengan menetapkan program-program prioritas. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan Langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Selain itu ditetapkan pula arah kebijakan sebagai rumusan kerangka kerja sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Bangkalan. Adapun strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Optimalisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.
3. Optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai mutu pelayanan minimal (SPM).
4. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.
5. Optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya berkenaan dengan arah kebijakan Satpol PP Kabupaten Bangkalan 3 (tiga) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Membentuk satlinmas tingkat desa dan kecamatan serta penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan satlinmas.
3. Meningkatkan standar mutu sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan trantibum linmas.
4. Meningkatkan standar kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai standar pelayanan minimal.
5. Membentuk Pasukan Tanggap Darurat Bencana (Trenggana) atau Tim Reaksi Cepat Penanggulanagan Bencana

6. Meningkatkan pelayanan kebencanaan berupa pemenuhan informasi rawan bencana dan optimalisasi evakuasi bencana kepada masyarakat.
7. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak.
8. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan.
9. Meningkatkan sarpras dan kualitas pelayanan SDM.

Secara lebih lengkap dapat dilihat keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Isu Strategis: 1. 2. Dst (Diisi dengan Isu Strategis Perangkat Daerah)			
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Sasaran : Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	1. Strategi 1.1. optimalisasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Strategi 1.2. optimalisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan Strategi 1.3. optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai mutu pelayanan minimal (SPM)	1. 1.1. Meningkatkan Penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat 1.2. membentuk satlinmas tingkat desa dan kecamatan serta penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan satlinmas 1.3. meningkatkan standar mutu sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan trantibum linmas 1.4. meningkatkan standar kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai standar pelayanan minimal 1.5. membentuk Pasukan Tanggap Darurat Bencana (Trenggana) atau Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana 1.6. meningkatkan pelayanan kebencanaan berupa pemenuhan informasi rawan bencana dan optimalisasi evakuasi bencana kepada masyarakat.

Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	2. Strategi 2.1. optimalissi penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	2. 2.1. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak 2.2. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	3. Strategi 3.1. optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat	3. 3.1. Meningkatkan sarpras dan kualitas pelayanan SDM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil (outcome) yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (supporting).

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 ini mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Bangkalan yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penan ggung jawab	Lokasi	
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Ta rge t	R p					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Menin gkatka n ketentr aman, keterti ban umum dan perlind ungan masyar akat				Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat atau perda yang terselesaikan	2, 17	%	2, 22	%	Rp 15.293.993. 416	2, 27	%	Rp 14.846.493. 417	2, 32	%	Rp 14.856.493. 417			SATU AN POLI SI PAM ONG PRAJ A	BANG KALA N
	Penguat an penegak an perda trantibn as dengan melakuk an edukasi dan pengend			Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	10 0	%	10 0	%	Rp 2.555.060.2 50	10 0	%	Rp 2.055.060.2 50	10 0	%	Rp 2.009.060.2 50				

	alian masyara kat																	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum	10 0	%	10 0	%	Rp 2.525.060.2 50	10 0	%	Rp 2.025.060.2 50	10 0	%	Rp 1.979.060.2 50			
		5.01.02 .2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	10 0	%	10 0	%	Rp 644.270.000	10 0	%	Rp 144.270.00 0	10 0	%	Rp 98.270.000			
		1.05.02 .2.01.0 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	48	Kasus	48	Kasus	Rp 7.250.000	48	Kasus	Rp 7.250.000	48	Kasus	Rp 7.250.000			

		1.05.02 .2.01.0 2	Penindakan atas Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3	Kasus	3	Kasus	Rp 2.500.000	3	Kasus	Rp 2.500.000	3	Kasus	Rp 2.500.000				
		1.05.02 .2.01.0 3	Koordinasi Penyelengga raan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	Doku men	3	Doku men	Rp 60.000.000	3	Doku men	Rp 60.000.000	3	Doku men	Rp 60.000.000				
		1.05.02 .2.01.0 4	Pemberdayaa n Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Doku men	1	Doku men	Rp 550.000.000	2	Doku men	Rp 50.000.000	1	Doku men	Rp 4.000.000				

		1.05.02 .2.01.0 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Orang	20	Orang	Rp 4.000.000	20	Orang	Rp 4.000.000	20	Orang	Rp 4.000.000		
		1.05.02 .2.01.0 7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	Doku men	1	Doku men	Rp 8.020.000	1	Doku men	Rp 8.020.000	1	Doku men	Rp 8.020.000		
		1.05.02 .2.01.0 9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Doku men	1	Doku men	Rp 2.500.000	1	Doku men	Rp 2.500.000	1	Doku men	Rp 2.500.000		
		1.05.02 .2.01.1 0	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan	1	Lapor an	1	Lapor an	Rp 10.000.000	1	Lapor an	Rp 10.000.000	1	Lapor an	Rp 10.000.000		

			Daerah dan Perkada	Perkada yang Terlayani														
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup	100	%	100	%	Rp 1.876.790.250	100	%	Rp 1.876.790.250	100	%	Rp 1.876.790.250			
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	30	Laporan	30	Laporan	Rp 1.621.985.400	30	Laporan	Rp 1.621.985.400	30	Laporan	Rp 1.621.985.400			
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6	Laporan	6	Laporan	Rp 4.804.850	6	Laporan	Rp 4.804.850	6	Laporan	Rp 4.804.850			

		1.05.02 .2.02.0 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	59	Lapor an	59	Lapor an	Rp 250.000.000	59	Lapor an	Rp 250.000.00 0	59	Lapor an	Rp 250.000.00 0				
		1.05.02 .2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase aparatur yang ikut pelatihan	10 0	%	10 0	%	Rp 4.000.000	10 0	%	Rp 4.000.000	10 0	%	Rp 4.000.000				
		1.05.02 .2.03.0 1	Pengembang an Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraa n Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Lapor an	1	Lapor an	Rp 4.000.000	1	Lapor an	Rp 4.000.000	1	Lapor an	Rp 4.000.000				
		1.05.03	PROGRAM PENANGG ULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penanggulanga n bencana	10 0	%	10 0	%	Rp 30.000.000	10 0	%	Rp 30.000.000	10 0	%	Rp 30.000.000				
		1.05.03 .2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	10 0	%	10 0	%	Rp 20.000.000	10 0	%	Rp 20.000.000	10 0	%	Rp 20.000.000				

		1.05.03 .2.02.0 8	Pengembang an Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapabilitas Teknis dan Manajerialnya	30	Orang	30	Orang	Rp 20.000.000	30	Orang	Rp 20.000.000	30	Orang	Rp 20.000.000				
		1.05.03 .2.03	Pelayanan Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	%	10 0	%	Rp 10.000.000	10 0	%	Rp 10.000.000	10 0	%	Rp 10.000.000				
		1.05.03 .2.03.0 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0	Orang	10	Orang	Rp 10.000.000	10	Orang	Rp 10.000.000	10	Orang	Rp 10.000.000				
	Peningk atan penanga nan dan penyela matan kebakar an secara respon time			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	70	%	75	%	Rp 175.000.000	80	%	Rp 175.000.00 0	85	%	Rp 175.000.00 0				
		01.05.0 4	PROGRAM PENCEGA HAN, PENANGG ULANGAN, PENYELA MATAN KEBAKAR AN DAN PENYELA MATAN NON	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	10 0	%	10 0	%	Rp 175.000.000	10 0	%	Rp 175.000.00 0	10 0	%	Rp 175.000.00 0				

			KEBAKARAN															
		1.05.04 .2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Waktu tanggap(respon time) penanganan kebakaran	91,67	%	90	%	Rp 104.835.200	88,3	%	Rp 104.835.200	86,67	%	Rp 104.835.200			
		1.05.04 .2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Peningkatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10	Dokumen	10	Dokumen	Rp 24.435.000	10	Dokumen	Rp 24.435.000	10	Dokumen	Rp 24.435.000			
		1.05.04 .2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	Laporan	20	Laporan	Rp 25.200.000	20	Laporan	Rp 25.200.000	20	Laporan	Rp 25.200.000			

		1.05.04 .2.01.0 3	Penyelamata n dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/E vakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20	Doku men	20	Doku men	Rp 46.000.000	20	Doku men	Rp 46.000.000	20	Doku men	Rp 46.000.000				
		1.05.04 .2.01.0 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	13	Unit	8	Unit	Rp 5.820.200	8	Unit	Rp 5.820.200	8	Unit	Rp 5.820.200				
		1.05.04 .2.01.0 7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	18	Orang	18	Orang	Rp 3.380.000	18	Orang	Rp 3.380.000	18	Orang	Rp 3.380.000				
		1.05.04 .2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	10 0	%	10 0	%	Rp 2.400.000	10 0	%	Rp 2.400.000	10 0	%	Rp 2.400.000				

		1.05.04 .2.02.0 1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedu ng/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	Doku men	2	Doku men	Rp 1.200.000	2	Doku men	Rp 1.200.000	2	Doku men	Rp 1.200.000				
		1.05.04 .2.02.0 2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedu ng/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Doku men	2	Doku men	Rp 1.200.000	2	Doku men	Rp 1.200.000	2	Doku men	Rp 1.200.000				
		1.05.04 .2.04	Pemberdaya an Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulanga n kebakaran	10 0	%	10 0	%	Rp 5.220.000	10 0	%	Rp 5.220.000	10 0	%	Rp 5.220.000				

		1.05.04 .2.04.0 1	Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	15	Orang	15	Orang	Rp 5.220.000	15	Orang	Rp 5.220.000	15	Orang	Rp 5.220.000				
		1.05.04 .2.05	Penyelengga raan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia	Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan	10 0	%	10 0	%	Rp 62.544.800	10 0	%	Rp 62.544.800	10 0	%	Rp 62.544.800				
		1.05.04 .2.05.0 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia/Pen yelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	2	Unit	15	Unit	Rp 62.544.800	15	Unit	Rp 62.544.800	15	Unit	Rp 62.544.800				

	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			Nilai SAKIP PD	60,39	nilai	60,85	nilai	Rp 12.563.933.166	61,25	nilai	Rp 12.616.433.167	61,85	nilai	Rp 12.672.433.167				
				Indeks Kepuasan Masyarakat	85,14	Indeks	85,25	Indeks		85,30	Indeks		85,50	Indeks					
		1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Indeks	100	Indeks	Rp 12.563.933.166	100	Indeks	Rp 12.616.433.167	100	Indeks	Rp 12.672.433.167				
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan	100%		100%		Rp 31.657.800	100%		Rp 31.657.800	100%		Rp 31.657.800				
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	Rp 6.164.500	3	Dokumen	Rp 6.164.500	3	Dokumen	Rp 6.164.500				

		5.01.01 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Doku men	1	Doku men	Rp 8.868.150	1	Doku men	Rp 8.868.150	1	Doku men	Rp 8.868.150				
		5.01.01 .2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Doku men	1	Doku men	Rp 1.791.750	1	Doku men	Rp 1.791.750	1	Doku men	Rp 1.791.750				
		5.01.01 .2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	0	Doku men	1	Doku men	Rp 850.000	1	Doku men	Rp 850.000	1	Doku men	Rp 850.000				
		5.01.01 .2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Doku men	1	Doku men	Rp 850.000	1	Doku men	Rp 850.000	1	Doku men	Rp 850.000				

		5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	Rp 7.012.650	1	Laporan	Rp 7.012.650	1	Laporan	Rp 7.012.650				
		5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	6	Laporan	Rp 6.120.750	6	Laporan	Rp 6.120.750	6	Laporan	Rp 6.120.750				
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	100 %		100 %		Rp 6.490.252.666	100 %		Rp 6.577.752.667	100 %		Rp 6.612.752.667				
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Orang /bulan	80	Orang /bulan	Rp 6.477.276.166	80	Orang /bulan	Rp 6.564.776.167	80	Orang /bulan	Rp 6.599.776.167				
		5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	Rp 7.141.850	1	Laporan	Rp 7.141.850	1	Laporan	Rp 7.141.850				

		5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan	Rp 5.834.650	18	Laporan	Rp 5.834.650	18	Laporan	Rp 5.834.650				
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir	100	%	100	%	Rp 3.222.700	100	%	Rp 3.222.700	100	%	Rp 3.222.700				
		5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen	Rp 1.611.350	1	Dokumen	Rp 1.611.350	1	Dokumen	Rp 1.611.350				
		5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	7	Laporan	Rp 1.611.350	7	Laporan	Rp 1.611.350	7	Laporan	Rp 1.611.350				
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100	%	100	%	Rp 20.000.000	100	%	Rp -	100	%	Rp 25.000.000				
		5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			322	Paket	Rp 20.000.000	0	Paket	Rp -	0	Paket	Rp -				

			Kelengkapan nya															
		5.01.01 .2.05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	orang	0	Orang	Rp -	0	Orang	Rp -	1	Orang	Rp 25.000.000			
		5.01.01 .2.06	Administراس i Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi	10 0	%	10 0	%	Rp 105.072.600	10 0	%	Rp 88.535.550	10 0	%	Rp 84.535.550			
		5.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	Rp 5.000.000	4	Paket	Rp 2.500.000	4	Paket	Rp 2.500.000			
		5.01.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	Rp 18.240.650	12	Paket	Rp 21.981.150	12	Paket	Rp 18.240.650			
		5.01.01 .2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	4	Paket	Rp 1.586.500	4	Paket	Rp 1.586.500	4	Paket	Rp 1.586.500			
		5.01.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	8	Paket	Rp 10.000.000	8	Paket	Rp 12.000.000	8	Paket	Rp 11.750.400			

		5.01.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	Rp 1.787.450	12	Paket	Rp 2.009.900	12	Paket	Rp 2.000.000				
		5.01.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	4	Doku men	4	Doku men	Rp 3.500.000	4	Doku men	Rp 3.500.000	4	Doku men	Rp 3.500.000				
		5.01.01 .2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lapor an	12	Lapor an	Rp 4.958.000	12	Lapor an	Rp 4.958.000	12	Lapor an	Rp 4.958.000				
		5.01.01 .2.06.0 9	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59	Lapor an	59	Lapor an	Rp 60.000.000	40	Lapor an	Rp 40.000.000	40	Lapor an	Rp 40.000.000				
		5.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	10 0	%	10 0	%	Rp -	10 0	%	Rp -	10 0	%	Rp -				
		1.05.01 .2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -				

		1.05.01 .2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -				
		1.05.01 .2.07.0 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -				
		5.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 0	%	10 0	%	Rp 5.649.144.8 00	10 0	%	Rp 5.650.681.8 50	10 0	%	Rp 5.650.681.8 50				
		5.01.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lapor an	4	Lapor an	Rp 1.462.950	4	Lapor an	Rp 3.000.000	4	Lapor an	Rp 3.000.000				
		5.01.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lapor an	12	Lapor an	Rp 201.281.850	12	Lapor an	Rp 201.281.85 0	12	Lapor an	Rp 201.281.85 0				
		5.01.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lapor an	12	Lapor an	Rp 5.446.400.0 00	12	Lapor an	Rp 5.446.400.0 00	12	Lapor an	Rp 5.446.400.0 00				
		5.01.01 .2.09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	10 0	%	10 0	%	Rp 264.582.600	10 0	%	Rp 264.582.60 0	10 0	%	Rp 264.582.60 0				

		5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Unit	1	Unit	Rp 30.240.000	1	Unit	Rp 30.240.000	1	Unit	Rp 30.240.000				
		5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	19	Unit	Rp 222.542.600	19	Unit	Rp 222.542.600	19	Unit	Rp 222.542.600				
		5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	15	Unit	Rp 4.470.000	15	Unit	Rp 4.470.000	15	Unit	Rp 4.470.000				
		5.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6	Unit	6	Unit	Rp 1.450.000	6	Unit	Rp 1.450.000	6	Unit	Rp 1.450.000				
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	Rp 5.880.000	1	Unit	Rp 5.880.000	1	Unit	Rp 5.880.000				
TOTAL									Rp 15.293.993.416			Rp 14.846.493.417			Rp 14.856.493.417				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas).

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga negara.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan 2024-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan.

Adapun pemetaan target dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	2,17%	2,22%	2,27%	2,32%	2,32%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	80%	100%	100%	100%	
	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	184 pelanggaran dan pengaduan	176 pelanggaran dan pengaduan	172 pelanggaran dan pengaduan	168 pelanggaran dan pengaduan	
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	60 Satlinmas	60 Satlinmas	60 Satlinmas	60 Satlinmas	
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7 perda	7 perda	7 perda	7 perda	
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 polisi pamong praja	1 polisi pamong praja	1 polisi pamong praja	1 polisi pamong praja	
	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	

2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	71%	71%	71%	71%	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	
	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	39 layanan penyelamatan dan evakuasi	40 layanan penyelamatan dan evakuasi	43 layanan penyelamatan dan evakuasi	45 layanan penyelamatan dan evakuasi	
	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	0	0	0	
	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	0	0	0	
	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	0	0	0	
	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	230 sarana prasarana	235 sarana prasarana	240 sarana prasarana	245 sarana prasarana	
	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	2 aparatur	2 aparatur	2 aparatur	2 aparatur	

	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	11 relawan	20 relawan	25 relawan	30 relawan	
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	91,67%	90%	88,3%	86,67%	

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses perumusan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2024- 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan. serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, yang berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan indikatif kurun waktu tiga tahun (2024-2026). Sasaran, program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan dan Rencana Kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan. Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan melakukan pengendalian dan evaluasi rencana strategis untuk mengukur, mengendalikan pelaksanaan kerja dan mengukur keberhasilan pencapaian yang telah ditargetkan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan dapat mewujudkan tujuan, sasaran, indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sehingga dapat mewujudkan ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator dari RPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026.

Bangkalan, Maret 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN

RUDIYANTO, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19740513 199302 1 001